



BUPATIBONE
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 25 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 60 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional maka Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
-

- 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 220);
 8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 60 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 61) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bone.
2. Bupati adalah Bupati Bone.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara Kabupaten.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap Desa.
12. Indeks Desa Membangun yang selanjutnya disingkat IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks

Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

13. Indeks Kesulitan Geografis yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
 14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.
 16. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi corona virus disease 19 (Covid-19)
2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Penetapan perubahan rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret sebesar 40% (empat

- puluh persen); dan
- c. tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
- (5) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati, dengan ketentuan:
- a. tahap I berupa :
1. peraturan bupati tentang tata cara penghitungan, penyaluran, penggunaan dan pelaporan dana desa;
 2. peraturan desa mengenai APBDes;
 3. surat kuasa pemindahbukuan dana desa.
- b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan atau capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen);
 2. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 3. Peraturan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa.
4. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 3 (tiga) Pasal yaitu Pasal 13A, Pasal 13B, dan Pasal 13C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dengan tambahan ketentuan:
- a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);

c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.

(2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4):

a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);

2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;

b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:

1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;

b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;

c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.

2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(3) Dalam hal desa telah salur Dana Desa Tahap II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4):

a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5),

b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.

(4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

Pasal 13B

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
 - c. tahap III berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen);
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan.
- (3) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.
- (4) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala Desa menyampaikan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran.
- (5) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri
- (6) Bupati melalui camat melakukan verifikasi kesesuaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kondisi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).
- (7) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran atas Desa yang layak salur kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa setiap minggu.

Pasal 13C

- (1) Dalam hal desa belum salur Dana Desa Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada bupati, dengan ketentuan:
 - a. Dana Desa tahap I disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:

1. bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
 2. bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;
 3. bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
- b. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
- c. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah salur Dana Desa Tahap I, Dana Desa disalurkan dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4):
- a. Untuk Dana Desa yang diterima belum dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Penyaluran Dana Desa tahap II dan tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
 2. Dana Desa tahap I diprioritaskan untuk BLT Desa;
 - b. Untuk Dana Desa yang diterima sudah dibelanjakan, diatur dengan ketentuan:
 1. Dana Desa tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan masing-masing:
 - a) bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai Penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa;
 - b) bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama;
 - c) bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua.
 2. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal desa telah salur Dana Desa Tahap II, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4):
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5);
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (4) Dalam hal Dana Desa yang telah disalurkan ke RKD secara bertahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) dan ayat (5) maupun penyaluran secara bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak

mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

5. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
 - (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa yang ditujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan/atau
 - b. jaring pengaman sosial di Desa.
 - (3) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Desa.
 - (4) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
 - (5) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.
6. Diantara Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 14A, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Jaring pengaman sosial di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (2) Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Kelurga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan;
 - b. Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja.
- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempertimbangkan

- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 bulan.
 - (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBDDes dengan ketentuan:
 - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
 - b. Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa; dan
 - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, kepala desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
 - (8) Ketentuan mengenai kriteria, mekanisme pendataan, penetapan data keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
7. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
 - (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
 - (3) Tata cara pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh kementerian teknis terkait.
 - (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Diantara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 16A dan Pasal 16B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A ayat (2), dikenakan sanksi berupa penghentian penyaluran Dana Desa tahap III tahun anggaran berjalan.

Pasal 16B

Ketentuan mengenai:

- a. Format laporan pelaksanaan BLT Desa;
- b. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa;
- c. Format laporan konvergensi pencegahan *stunting* tahun anggaran sebelumnya; dan
- d. Format lembar konfirmasi penerimaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a. sisa Dana Desa di RKD; dan atau
 - b. capaian keluaran Dana Desa.
 - (2) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.
 - (3) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13B ayat (1) sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
 - (4) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
 - (5) Kepala Desa melakukan rekonsiliasi data kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali di tahun anggaran berikutnya dengan bupati paling lambat minggu kedua bulan oktober 2020.
 - (6) Kepala Desa menyetorkan sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan tahun 2018 hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ke
-

RKUD paling lambat akhir bulan Oktober 2020.

- (7) Sisa Dana Desa tahun 2019 yang masih berada di RKUD, dapat disalurkan ke RKD paling lambat bulan Juli 2020.
- (8) Bupati melakukan rekonsiliasi dengan Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa atas kumulatif sisa Dana Desa tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan sisa Dana di RKUD tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 yang tidak disalurkan ke RKD paling lambat akhir bulan November 2020.
- (9) Bupati menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ke RKUN paling lambat akhir bulan Desember 2020.
- (10) Dalam hal bupati tidak menyetorkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Menteri Keuangan memperhitungkan sisa Dana Desa tersebut melalui pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil tahun anggaran berikutnya.
- (11) Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (10) , ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama Menteri Keuangan.
- (12) Dalam hal terdapat sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di RKD yang tidak dipergunakan atau tidak dianggarkan kembali pada Tahun Anggaran 2020, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan pada saat penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2020.
- (13) Perhitungan sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) berdasarkan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Pasal II

1. Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, permohonan penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020:
 - a. yang telah disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati dan/atau sudah diajukan ke KPPN; dan
 - b. yang telah disampaikan oleh bupati kepada KPPN namun diperlukan penyesuaian/perbaikan dokumen,penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2020 tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun

2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020.

2. Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 19 MEI 2020

BUPATI BONE, *K*


A. FAHSAR M. PADJALANGI *M*

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 14 MEI 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


A. MUHAMMAD YAMIN AT.

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020 NOMOR 25

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BONE

NOMOR 25 TAHUN 2020

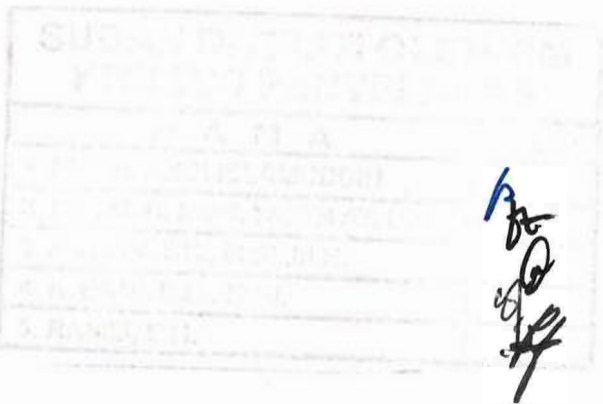
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 60 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DI SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

| No. | Kecamatan | Nama Desa | Alokasi Dasar | Alokasi Afirmasi | Alokasi Kinerja | Alokasi Formula | Total Pagu Dana Desa per-Desa |
|-----|-----------|--------------|---------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Bontocani | Watang Cani | 651.999.000 | - | - | 595.301.000 | 1.247.300.000 |
| 2 | Bontocani | Pattuku | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 423.787.000 | 1.257.420.000 |
| 3 | Bontocani | Bontojai | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 675.178.000 | 1.508.811.000 |
| 4 | Bontocani | Bana | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 768.058.000 | 1.601.691.000 |
| 5 | Bontocani | Pammusureng | 651.999.000 | - | - | 489.519.000 | 1.141.518.000 |
| 6 | Bontocani | Langi | 651.999.000 | - | - | 592.429.000 | 1.244.428.000 |
| 7 | Bontocani | Ere Cinnong | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 430.154.000 | 1.263.787.000 |
| 8 | Bontocani | Bulu Sirua | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 599.566.000 | 1.433.199.000 |
| 9 | Bontocani | Lamoncong | 651.999.000 | - | - | 307.313.000 | 959.312.000 |
| 10 | Bontocani | Mattirowalie | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 354.853.000 | 1.188.486.000 |
| 11 | Kahu | Nusa | 651.999.000 | - | - | 236.278.000 | 888.277.000 |
| 12 | Kahu | Pasaka | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 353.845.000 | 1.149.940.000 |
| 13 | Kahu | Labuaja | 651.999.000 | - | - | 251.401.000 | 903.400.000 |
| 14 | Kahu | Cakkela | 651.999.000 | - | - | 239.703.000 | 891.702.000 |
| 15 | Kahu | Balle | 651.999.000 | - | - | 233.813.000 | 885.812.000 |
| 16 | Kahu | Matajang | 651.999.000 | - | - | 251.796.000 | 903.795.000 |
| 17 | Kahu | Cenrana | 651.999.000 | - | - | 238.672.000 | 890.671.000 |
| 18 | Kahu | Sanrego | 651.999.000 | - | - | 390.630.000 | 1.042.629.000 |
| 19 | Kahu | Biru | 651.999.000 | - | - | 371.387.000 | 1.023.386.000 |
| 20 | Kahu | Palakka | 651.999.000 | - | - | 249.939.000 | 901.938.000 |
| 21 | Kahu | Tompong Patu | 651.999.000 | - | - | 397.275.000 | 1.049.274.000 |
| 22 | Kahu | Hulo | 651.999.000 | - | - | 284.881.000 | 936.880.000 |
| 23 | Kahu | Cammilo | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 314.345.000 | 1.110.440.000 |
| 24 | Kahu | Carima | 651.999.000 | - | - | 157.052.000 | 809.051.000 |
| 25 | Kahu | Mattoanging | 651.999.000 | - | - | 185.969.000 | 837.968.000 |
| 26 | Kahu | Arallae | 651.999.000 | - | - | 261.974.000 | 913.973.000 |
| 27 | Kahu | Bonto Padang | 651.999.000 | - | - | 174.352.000 | 826.351.000 |
| 28 | Kahu | Lalepo | 651.999.000 | - | - | 215.041.000 | 867.040.000 |
| 29 | Kahu | Maggenrang | 651.999.000 | - | - | 222.797.000 | 874.796.000 |
| 30 | Kajuara | Raja | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 404.173.000 | 1.200.268.000 |
| 31 | Kajuara | Abbumpungeng | 651.999.000 | - | - | 346.684.000 | 998.683.000 |
| 32 | Kajuara | Bulu Tanah | 651.999.000 | - | - | 305.425.000 | 957.424.000 |
| 33 | Kajuara | Gona | 651.999.000 | - | - | 505.065.000 | 1.157.064.000 |
| 34 | Kajuara | Buareng | 651.999.000 | - | - | 235.870.000 | 887.869.000 |
| 35 | Kajuara | Polewali | 651.999.000 | - | - | 190.092.000 | 842.091.000 |
| 36 | Kajuara | Padaelo | 651.999.000 | - | - | 200.933.000 | 852.932.000 |
| 37 | Kajuara | Ancu | 651.999.000 | - | - | 157.116.000 | 809.115.000 |
| 38 | Kajuara | Tarasu | 651.999.000 | - | - | 353.038.000 | 1.005.037.000 |
| 39 | Kajuara | Lemo | 651.999.000 | - | - | 354.702.000 | 1.006.701.000 |
| 40 | Kajuara | Kalero | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 538.256.000 | 1.334.351.000 |
| 41 | Kajuara | Lappabosse | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 593.445.000 | 1.427.078.000 |
| 42 | Kajuara | Waetuo | 651.999.000 | - | - | 242.393.000 | 894.392.000 |
| 43 | Kajuara | Pude | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 299.679.000 | 1.095.774.000 |
| 44 | Kajuara | Angkue | 651.999.000 | - | - | 270.829.000 | 922.828.000 |
| 45 | Kajuara | Massangkae | 651.999.000 | - | - | 494.385.000 | 1.146.384.000 |
| 46 | Kajuara | Maliahae | 651.999.000 | - | - | 278.201.000 | 930.200.000 |
| 47 | Salomekko | Malimongeng | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 466.293.000 | 1.262.388.000 |
| 48 | Salomekko | Manera | 651.999.000 | - | - | 329.657.000 | 981.656.000 |
| 49 | Salomekko | Ulubalang | 651.999.000 | - | - | 338.632.000 | 990.631.000 |
| 50 | Salomekko | Gattareng | 651.999.000 | - | - | 496.296.000 | 1.148.295.000 |
| 51 | Salomekko | Bellu | 651.999.000 | - | - | 223.486.000 | 875.485.000 |
| 52 | Salomekko | Tebba | 651.999.000 | - | - | 194.185.000 | 846.184.000 |
| 53 | Salomekko | Mappatoba | 651.999.000 | - | - | 222.334.000 | 874.333.000 |
| 54 | Tonra | Bulu Bulu | 651.999.000 | - | - | 320.284.000 | 972.283.000 |
| 55 | Tonra | Gareccing | 651.999.000 | - | - | 276.436.000 | 928.435.000 |
| 56 | Tonra | Biccoing | 651.999.000 | - | - | 300.669.000 | 952.668.000 |
| 57 | Tonra | Ujunge | 651.999.000 | - | - | 229.384.000 | 881.383.000 |
| 58 | Tonra | Libureng | 651.999.000 | - | - | 236.303.000 | 888.302.000 |
| 59 | Tonra | Rappa | 651.999.000 | - | - | 362.235.000 | 1.014.234.000 |
| 60 | Tonra | Bacu | 651.999.000 | - | - | 265.973.000 | 917.972.000 |
| 61 | Tonra | Muara | 651.999.000 | - | - | 239.457.000 | 891.456.000 |
| 62 | Tonra | Bone Pute | 651.999.000 | - | - | 237.256.000 | 889.255.000 |
| 63 | Tonra | Padatuo | 651.999.000 | - | - | 307.840.000 | 959.839.000 |
| 64 | Tonra | Samaenre | 651.999.000 | - | - | 268.859.000 | 920.858.000 |
| 65 | Libureng | Tompo Bulu | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 331.212.000 | 1.164.845.000 |
| 66 | Libureng | Tappale | 651.999.000 | - | - | 216.183.000 | 868.182.000 |
| 67 | Libureng | Polewali | 651.999.000 | - | - | 203.219.000 | 855.218.000 |
| 68 | Libureng | Pitumpidange | 651.999.000 | - | - | 212.947.000 | 864.946.000 |
| 69 | Libureng | Bune | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 348.364.000 | 1.181.997.000 |
| 70 | Libureng | Swadaya | 651.999.000 | - | - | 243.394.000 | 895.393.000 |
| 71 | Libureng | Binuang | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 319.412.000 | 1.153.045.000 |
| 72 | Libureng | Mallirung | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 488.087.000 | 1.321.720.000 |
| 73 | Libureng | Baringeng | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 425.895.000 | 1.259.528.000 |
| 74 | Libureng | Mario | 651.999.000 | - | - | 219.762.000 | 871.761.000 |
| 75 | Libureng | Wanuawaru | 651.999.000 | - | - | 227.696.000 | 879.695.000 |
| 76 | Libureng | Mattirowalie | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 325.977.000 | 1.159.610.000 |

| | | | | | | | |
|-----|------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 77 | Libureng | Poleonro | 651.999.000 | - | - | 244.439.000 | 896.438.000 |
| 78 | Libureng | Mattiro Bulu | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 336.105.000 | 1.169.738.000 |
| 79 | Libureng | Mattiro Deceng | 651.999.000 | - | - | 223.358.000 | 875.357.000 |
| 80 | Libureng | Suwa | 651.999.000 | - | - | 172.491.000 | 824.490.000 |
| 81 | Libureng | Laburasseng | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 320.018.000 | 1.153.651.000 |
| 82 | Libureng | Ponre Ponre | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 342.913.000 | 1.176.546.000 |
| 83 | Mare | Mattirawalie | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 297.465.000 | 1.131.098.000 |
| 84 | Mare | Mario | 651.999.000 | - | - | 323.947.000 | 975.946.000 |
| 85 | Mare | Ujung Salangketo | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 298.861.000 | 1.094.956.000 |
| 86 | Mare | Tellu Boccoe | 651.999.000 | - | - | 168.310.000 | 820.309.000 |
| 87 | Mare | Mattampa Walie | 651.999.000 | - | - | 253.573.000 | 905.572.000 |
| 88 | Mare | Ujung Tanah | 651.999.000 | - | - | 360.672.000 | 1.012.671.000 |
| 89 | Mare | Sumaling | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 261.099.000 | 1.094.732.000 |
| 90 | Mare | Tellongeng | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 424.116.000 | 1.220.211.000 |
| 91 | Mare | Data | 651.999.000 | - | - | 259.554.000 | 911.553.000 |
| 92 | Mare | Batu Gading | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 381.432.000 | 1.177.527.000 |
| 93 | Mare | Cege | 651.999.000 | - | - | 227.230.000 | 879.229.000 |
| 94 | Mare | Kadai | 651.999.000 | - | - | 204.716.000 | 856.715.000 |
| 95 | Mare | Lakukang | 651.999.000 | - | - | 246.568.000 | 898.567.000 |
| 96 | Mare | Pattiro | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 311.011.000 | 1.144.644.000 |
| 97 | Mare | Lapasa | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 243.975.000 | 1.040.070.000 |
| 98 | Mare | Karella | 651.999.000 | - | - | 129.770.000 | 781.769.000 |
| 99 | Mare | Lappa Upang | 651.999.000 | - | - | 328.016.000 | 980.015.000 |
| 100 | Sibulue | Pattiro Bajo | 651.999.000 | - | - | 165.415.000 | 817.414.000 |
| 101 | Sibulue | Massenreng Pulu | 651.999.000 | - | - | 208.674.000 | 860.673.000 |
| 102 | Sibulue | Tunreng Tellue | 651.999.000 | - | - | 228.686.000 | 880.685.000 |
| 103 | Sibulue | Poiewali | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 256.411.000 | 1.090.044.000 |
| 104 | Sibulue | Tadang Palie | 651.999.000 | - | - | 194.047.000 | 846.046.000 |
| 105 | Sibulue | Cinnong | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 304.480.000 | 1.138.113.000 |
| 106 | Sibulue | Mallusetasi | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 327.256.000 | 1.160.889.000 |
| 107 | Sibulue | Pakkasalo | 651.999.000 | - | - | 234.346.000 | 886.345.000 |
| 108 | Sibulue | Pattiro Sompe | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 472.083.000 | 1.305.716.000 |
| 109 | Sibulue | Ajang Pulu | 651.999.000 | - | - | 219.025.000 | 871.024.000 |
| 110 | Sibulue | Sumpang Minangae | 651.999.000 | - | - | 223.108.000 | 875.107.000 |
| 111 | Sibulue | Mabbiring | 651.999.000 | - | - | 234.854.000 | 886.853.000 |
| 112 | Sibulue | Pasaka | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 311.379.000 | 1.145.012.000 |
| 113 | Sibulue | Kalibong | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 286.005.000 | 1.119.638.000 |
| 114 | Sibulue | Pattiro Riolo | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 363.044.000 | 1.196.677.000 |
| 115 | Sibulue | Letta Tanah | 651.999.000 | - | - | 256.105.000 | 908.104.000 |
| 116 | Sibulue | Manajeng | 651.999.000 | - | - | 301.318.000 | 953.317.000 |
| 117 | Sibulue | Bulie | 651.999.000 | - | - | 171.713.000 | 823.712.000 |
| 118 | Sibulue | BaliengToa | 651.999.000 | - | - | 224.838.000 | 876.837.000 |
| 119 | Barebbo | Bacu | 651.999.000 | - | - | 190.593.000 | 842.592.000 |
| 120 | Barebbo | Lampoko | 651.999.000 | - | - | 268.529.000 | 920.528.000 |
| 121 | Barebbo | Congko | 651.999.000 | - | - | 196.572.000 | 848.571.000 |
| 122 | Barebbo | Wolangi | 651.999.000 | - | - | 198.293.000 | 850.292.000 |
| 123 | Barebbo | Parippung | 651.999.000 | - | - | 189.113.000 | 841.112.000 |
| 124 | Barebbo | Barebbo | 651.999.000 | - | - | 305.890.000 | 957.889.000 |
| 125 | Barebbo | Kampuno | 651.999.000 | - | - | 309.443.000 | 961.442.000 |
| 126 | Barebbo | Kading | 651.999.000 | - | - | 418.277.000 | 1.070.276.000 |
| 127 | Barebbo | Kajajaliddong | 651.999.000 | - | - | 241.875.000 | 893.874.000 |
| 128 | Barebbo | Samaelo | 651.999.000 | - | - | 236.077.000 | 888.076.000 |
| 129 | Barebbo | Corawali | 651.999.000 | - | - | 270.446.000 | 922.445.000 |
| 130 | Barebbo | Talungeng | 651.999.000 | - | - | 173.403.000 | 825.402.000 |
| 131 | Barebbo | Watu | 651.999.000 | - | - | 344.031.000 | 996.030.000 |
| 132 | Barebbo | Cingkang | 651.999.000 | - | - | 163.387.000 | 815.386.000 |
| 133 | Barebbo | Cinnong | 651.999.000 | - | - | 167.505.000 | 819.504.000 |
| 134 | Barebbo | Cempaniga | 651.999.000 | - | - | 216.125.000 | 868.124.000 |
| 135 | Barebbo | Sugiale | 651.999.000 | - | - | 181.195.000 | 833.194.000 |
| 136 | Cina | Arasoe | 651.999.000 | - | - | 373.306.000 | 1.025.305.000 |
| 137 | Cina | Tanete Harapan | 651.999.000 | - | - | 235.078.000 | 887.077.000 |
| 138 | Cina | Lompu | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 614.294.000 | 1.447.927.000 |
| 139 | Cina | Walengeng | 651.999.000 | - | - | 387.280.000 | 1.039.279.000 |
| 140 | Cina | Ajang Pulu | 651.999.000 | - | - | 336.416.000 | 988.415.000 |
| 141 | Cina | Padang Loang | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 230.065.000 | 1.063.698.000 |
| 142 | Cina | Abbumpungeng | 651.999.000 | - | - | 467.028.000 | 1.119.027.000 |
| 143 | Cina | Kawerang | 651.999.000 | - | - | 304.713.000 | 956.712.000 |
| 144 | Cina | Awo | 651.999.000 | - | - | 296.633.000 | 948.632.000 |
| 145 | Cina | Kanco | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 244.588.000 | 1.078.221.000 |
| 146 | Cina | Cinennung | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 295.494.000 | 1.091.589.000 |
| 147 | Ponre | Mappesangka | 651.999.000 | - | - | 517.531.000 | 1.169.530.000 |
| 148 | Ponre | Salebba | 651.999.000 | - | - | 337.161.000 | 989.160.000 |
| 149 | Ponre | Mattampae | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 357.529.000 | 1.191.162.000 |
| 150 | Ponre | Pattimpa | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 496.704.000 | 1.330.337.000 |
| 151 | Ponre | Tellu Boccoe | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 599.163.000 | 1.432.796.000 |
| 152 | Ponre | Turu Adae | 651.999.000 | - | - | 278.497.000 | 930.496.000 |
| 153 | Ponre | Salampe | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 266.209.000 | 1.099.842.000 |
| 154 | Ponre | Poleonro | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 387.318.000 | 1.220.951.000 |
| 155 | Ponre | Bolli | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 440.174.000 | 1.273.807.000 |
| 156 | Lappariaja | Mattampawalie | 651.999.000 | - | - | 525.104.000 | 1.177.103.000 |
| 157 | Lappariaja | Lili Riattang | 651.999.000 | - | - | 378.424.000 | 1.030.423.000 |
| 158 | Lappariaja | Sengeng Palie | 651.999.000 | - | - | 327.667.000 | 979.666.000 |
| 159 | Lappariaja | Tenri Pakkua | 651.999.000 | - | - | 403.256.000 | 1.055.255.000 |
| 160 | Lappariaja | Patangkai | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 304.383.000 | 1.100.478.000 |
| 161 | Lappariaja | Ujung Lamuru | 651.999.000 | - | - | 451.596.000 | 1.103.595.000 |
| 162 | Lappariaja | Pattuku Lim poe | 651.999.000 | - | - | 507.137.000 | 1.159.136.000 |
| 163 | Lappariaja | Waekece'e | 651.999.000 | - | - | 287.946.000 | 939.945.000 |
| 164 | Lappariaja | Ton ronge | 651.999.000 | - | - | 531.151.000 | 1.183.150.000 |
| 165 | Lamuru | Mattampa Walie | 651.999.000 | - | - | 304.069.000 | 956.068.000 |

| | | | | | | | |
|-----|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 166 | Lamuru | Poleonro | 651.999.000 | - | - | 210.773.000 | 862.772.000 |
| 167 | Lamuru | Sengeng Palie | 651.999.000 | - | - | 364.235.000 | 1.016.234.000 |
| 168 | Lamuru | Mattampa Bulu | 651.999.000 | - | - | 458.700.000 | 1.110.699.000 |
| 169 | Lamuru | Turu Cinnae | 651.999.000 | - | - | 338.362.000 | 990.361.000 |
| 170 | Lamuru | Seberang | 651.999.000 | - | - | 198.872.000 | 850.871.000 |
| 171 | Lamuru | Massenreng pulu | 651.999.000 | - | - | 440.318.000 | 1.092.317.000 |
| 172 | Lamuru | Mamminasae | 651.999.000 | - | - | 409.580.000 | 1.061.579.000 |
| 173 | Lamuru | Padaelo | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 300.269.000 | 1.133.902.000 |
| 174 | Lamuru | Barugae | 651.999.000 | - | - | 230.110.000 | 882.109.000 |
| 175 | Lamuru | Barakkae | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 394.273.000 | 1.227.906.000 |
| 176 | Ulaweng | Liina Ajangale | 651.999.000 | - | - | 559.719.000 | 1.211.718.000 |
| 177 | Ulaweng | Cani Sirenreng | 651.999.000 | - | - | 347.589.000 | 999.588.000 |
| 178 | Ulaweng | Ulaweng Cinnong | 651.999.000 | - | - | 359.015.000 | 1.011.014.000 |
| 179 | Ulaweng | Pallawarukka | 651.999.000 | - | - | 178.781.000 | 830.780.000 |
| 180 | Ulaweng | Jompie | 651.999.000 | - | - | 240.366.000 | 892.365.000 |
| 181 | Ulaweng | Sappewalie | 651.999.000 | - | - | 369.427.000 | 1.021.426.000 |
| 182 | Ulaweng | Lamakkaraseng | 651.999.000 | - | - | 300.161.000 | 952.160.000 |
| 183 | Ulaweng | Mula Menree | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 380.204.000 | 1.176.299.000 |
| 184 | Ulaweng | Tea Musu | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 339.620.000 | 1.135.715.000 |
| 185 | Ulaweng | Tea Malala | 651.999.000 | - | - | 335.366.000 | 987.365.000 |
| 186 | Ulaweng | Galung | 651.999.000 | - | - | 270.179.000 | 922.178.000 |
| 187 | Ulaweng | Tadang Palie | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 346.120.000 | 1.142.215.000 |
| 188 | Ulaweng | Timusu | 651.999.000 | - | - | 316.426.000 | 968.425.000 |
| 189 | Ulaweng | Manurunge | 651.999.000 | - | - | 300.597.000 | 952.596.000 |
| 190 | Palakka | Cinennung | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 361.613.000 | 1.157.708.000 |
| 191 | Palakka | Siame | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 436.681.000 | 1.270.314.000 |
| 192 | Palakka | Pasempe | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 415.166.000 | 1.248.799.000 |
| 193 | Palakka | Ureng | 651.999.000 | - | - | 238.775.000 | 890.774.000 |
| 194 | Palakka | Usa | 651.999.000 | - | - | 292.871.000 | 944.870.000 |
| 195 | Palakka | Mico | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 346.861.000 | 1.180.494.000 |
| 196 | Palakka | Bainang | 651.999.000 | - | - | 279.698.000 | 931.697.000 |
| 197 | Palakka | Passippo | 651.999.000 | - | - | 236.999.000 | 888.998.000 |
| 198 | Palakka | Tanah Tengnga | 651.999.000 | - | - | 317.960.000 | 969.959.000 |
| 199 | Palakka | Tirong | 651.999.000 | - | - | 187.123.000 | 839.122.000 |
| 200 | Palakka | Mattanete Bua | 651.999.000 | - | - | 198.109.000 | 850.108.000 |
| 201 | Palakka | Maduri | 651.999.000 | - | - | 206.033.000 | 858.032.000 |
| 202 | Palakka | Melle | 651.999.000 | - | - | 308.999.000 | 960.998.000 |
| 203 | Palakka | Lemo Ape | 651.999.000 | - | - | 289.732.000 | 941.731.000 |
| 204 | Palakka | Panyili | 651.999.000 | - | - | 174.835.000 | 826.834.000 |
| 205 | Awangpone | Carebbu | 651.999.000 | - | - | 500.323.000 | 1.152.322.000 |
| 206 | Awangpone | Cumpiga | 651.999.000 | - | - | 246.256.000 | 898.255.000 |
| 207 | Awangpone | Pacing | 651.999.000 | - | - | 283.185.000 | 935.184.000 |
| 208 | Awangpone | Lattekko | 651.999.000 | - | - | 298.060.000 | 950.059.000 |
| 209 | Awangpone | Matuju | 651.999.000 | - | - | 238.855.000 | 890.854.000 |
| 210 | Awangpone | Unra | 651.999.000 | - | - | 330.774.000 | 982.773.000 |
| 211 | Awangpone | Kading | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 271.058.000 | 1.067.153.000 |
| 212 | Awangpone | Mallari | 651.999.000 | - | - | 381.861.000 | 1.033.860.000 |
| 213 | Awangpone | Kajura | 651.999.000 | - | - | 302.345.000 | 954.344.000 |
| 214 | Awangpone | Jaling | 651.999.000 | - | - | 343.337.000 | 995.336.000 |
| 215 | Awangpone | Bulumpare'e | 651.999.000 | - | - | 302.751.000 | 954.750.000 |
| 216 | Awangpone | Abbanuang | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 337.413.000 | 1.171.046.000 |
| 217 | Awangpone | Lappoase | 651.999.000 | - | - | 278.196.000 | 930.195.000 |
| 218 | Awangpone | Awolagading | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 246.567.000 | 1.080.200.000 |
| 219 | Awangpone | Carigading | 651.999.000 | - | - | 177.439.000 | 829.438.000 |
| 220 | Awangpone | Cakke Bone | 651.999.000 | - | - | 248.759.000 | 900.758.000 |
| 221 | Awangpone | Mappalo Ulaweng | 651.999.000 | - | - | 201.796.000 | 853.795.000 |
| 222 | Tellu Siattinge | Palongki | 651.999.000 | - | - | 452.984.000 | 1.104.983.000 |
| 223 | Tellu Siattinge | Tajong | 651.999.000 | - | - | 388.747.000 | 1.040.746.000 |
| 224 | Tellu Siattinge | Ulo | 651.999.000 | - | - | 448.278.000 | 1.100.277.000 |
| 225 | Tellu Siattinge | Lanca | 651.999.000 | - | - | 256.913.000 | 908.912.000 |
| 226 | Tellu Siattinge | Itterung | 651.999.000 | - | - | 353.905.000 | 1.005.904.000 |
| 227 | Tellu Siattinge | Mattoanging | 651.999.000 | - | - | 343.200.000 | 995.199.000 |
| 228 | Tellu Siattinge | Lamuru | 651.999.000 | - | - | 679.556.000 | 1.331.555.000 |
| 229 | Tellu Siattinge | Waji | 651.999.000 | - | - | 460.528.000 | 1.112.527.000 |
| 230 | Tellu Siattinge | Ajjalireng | 651.999.000 | - | - | 204.164.000 | 856.163.000 |
| 231 | Tellu Siattinge | Sijjeling | 651.999.000 | - | - | 511.399.000 | 1.163.398.000 |
| 232 | Tellu Siattinge | Lea | 651.999.000 | - | - | 231.079.000 | 883.078.000 |
| 233 | Tellu Siattinge | Padaidi | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 374.349.000 | 1.207.982.000 |
| 234 | Tellu Siattinge | Pongka | 651.999.000 | - | - | 262.555.000 | 914.554.000 |
| 235 | Tellu Siattinge | Lappae | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 248.759.000 | 1.082.392.000 |
| 236 | Tellu Siattinge | Patangnga | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 333.841.000 | 1.167.474.000 |
| 237 | Ajangale | Welado | 651.999.000 | - | - | 445.749.000 | 1.097.748.000 |
| 238 | Ajangale | Pinceng Pute | 651.999.000 | - | - | 351.364.000 | 1.003.363.000 |
| 239 | Ajangale | Opo | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 365.545.000 | 1.199.178.000 |
| 240 | Ajangale | Labissa | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 311.142.000 | 1.107.237.000 |
| 241 | Ajangale | Timurung | 651.999.000 | - | - | 426.291.000 | 1.078.290.000 |
| 242 | Ajangale | Leppangeng | 651.999.000 | - | - | 365.330.000 | 1.017.329.000 |
| 243 | Ajangale | Allamungeng Patue | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 354.688.000 | 1.188.321.000 |
| 244 | Ajangale | Amessangeng | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 327.120.000 | 1.123.215.000 |
| 245 | Ajangale | Lebbae | 651.999.000 | - | - | 363.451.000 | 1.015.450.000 |
| 246 | Ajangale | Manciri | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 357.216.000 | 1.153.311.000 |
| 247 | Ajangale | Telle | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 367.512.000 | 1.163.607.000 |
| 248 | Ajangale | Pacciro | 651.999.000 | - | - | 381.666.000 | 1.033.665.000 |
| 249 | Dua Boccoe | Mario | 651.999.000 | - | - | 367.886.000 | 1.019.885.000 |
| 250 | Dua Boccoe | Laccori | 651.999.000 | - | - | 313.112.000 | 965.111.000 |
| 251 | Dua Boccoe | Pattiro | 651.999.000 | - | - | 242.204.000 | 894.203.000 |
| 252 | Dua Boccoe | Cabbeng | 651.999.000 | - | - | 254.067.000 | 906.066.000 |
| 253 | Dua Boccoe | Panyili | 651.999.000 | - | - | 367.370.000 | 1.019.369.000 |
| 254 | Dua Boccoe | Sanrangeng | 651.999.000 | - | - | 276.021.000 | 928.020.000 |

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 254 | Dua Boccoe | Sanrangeng | 651.999.000 | - | - | 276.021.000 | 928.020.000 |
| 255 | Dua Boccoe | Sailong | 651.999.000 | - | - | 224.278.000 | 876.277.000 |
| 256 | Dua Boccoe | Melle | 651.999.000 | - | - | 307.580.000 | 959.579.000 |
| 257 | Dua Boccoe | Pakkasalo | 651.999.000 | - | - | 316.713.000 | 968.712.000 |
| 258 | Dua Boccoe | Tawaroe | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 363.230.000 | 1.159.325.000 |
| 259 | Dua Boccoe | Uloe | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 141.866.000 | 937.961.000 |
| 260 | Dua Boccoe | Ujung | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 183.469.000 | 979.564.000 |
| 261 | Dua Boccoe | Padacenga | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 255.996.000 | 1.052.091.000 |
| 262 | Dua Boccoe | Lailatang | 651.999.000 | - | - | 220.435.000 | 872.434.000 |
| 263 | Dua Boccoe | Kampoti | 651.999.000 | - | - | 242.957.000 | 894.956.000 |
| 264 | Dua Boccoe | Praja Maju | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 296.765.000 | 1.092.860.000 |
| 265 | Dua Boccoe | Tocina | 651.999.000 | - | - | 193.118.000 | 845.117.000 |
| 266 | Dua Boccoe | Tempe | 651.999.000 | - | - | 200.316.000 | 852.315.000 |
| 267 | Dua Boccoe | Solo | 651.999.000 | - | - | 208.170.000 | 860.169.000 |
| 268 | Dua Boccoe | Watang Padacenga | 651.999.000 | - | - | 179.383.000 | 831.382.000 |
| 269 | Dua Boccoe | Matajang | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 214.457.000 | 1.048.090.000 |
| 270 | Cenrana | Pacubbe | 651.999.000 | - | - | 224.633.000 | 876.632.000 |
| 271 | Cenrana | Panylwi | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 261.818.000 | 1.095.451.000 |
| 272 | Cenrana | Latonro | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 345.268.000 | 1.178.901.000 |
| 273 | Cenrana | Watu | 651.999.000 | - | - | 274.063.000 | 926.062.000 |
| 274 | Cenrana | Nagauleng | 651.999.000 | - | - | 215.444.000 | 867.443.000 |
| 275 | Cenrana | Cakkeware | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 171.661.000 | 967.756.000 |
| 276 | Cenrana | Pallime | 651.999.000 | - | - | 225.566.000 | 877.565.000 |
| 277 | Cenrana | Laoni | 651.999.000 | - | - | 227.220.000 | 879.219.000 |
| 278 | Cenrana | Labotto | 651.999.000 | - | - | 472.737.000 | 1.124.736.000 |
| 279 | Cenrana | Awang Cenrana | 651.999.000 | - | - | 439.431.000 | 1.091.430.000 |
| 280 | Cenrana | Lebongnge | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 540.491.000 | 1.374.124.000 |
| 281 | Cenrana | Ajalasse | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 298.569.000 | 1.132.202.000 |
| 282 | Cenrana | Pusungnge | 651.999.000 | - | - | 239.192.000 | 891.191.000 |
| 283 | Cenrana | Pallae | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 294.730.000 | 1.090.825.000 |
| 284 | Cenrana | WatangTa | 651.999.000 | - | - | 223.382.000 | 875.381.000 |
| 285 | Amali | Lili Riattang | 651.999.000 | - | - | 169.155.000 | 821.154.000 |
| 286 | Amali | Mattaropuræ | 651.999.000 | - | - | 372.347.000 | 1.024.346.000 |
| 287 | Amali | Ulaweng Raja | 651.999.000 | - | - | 347.193.000 | 999.192.000 |
| 288 | Amali | Waempubbu | 651.999.000 | - | - | 526.697.000 | 1.178.696.000 |
| 289 | Amali | Waemputtange | 651.999.000 | - | - | 226.615.000 | 878.614.000 |
| 290 | Amali | Amali Riattang | 651.999.000 | - | - | 308.648.000 | 960.647.000 |
| 291 | Amali | Tassipi | 651.999.000 | - | - | 191.793.000 | 843.792.000 |
| 292 | Amali | Wellulang | 651.999.000 | - | - | 222.437.000 | 874.436.000 |
| 293 | Amali | Benteng Tellue | 651.999.000 | - | - | 326.027.000 | 978.026.000 |
| 294 | Amali | Tacipong | 651.999.000 | - | - | 221.386.000 | 873.385.000 |
| 295 | Amali | Lapon rong | 651.999.000 | - | - | 315.592.000 | 967.591.000 |
| 296 | Amali | Ajanglaleng | 651.999.000 | - | - | 238.277.000 | 890.276.000 |
| 297 | Amali | Tocinnong | 651.999.000 | - | - | 203.113.000 | 855.112.000 |
| 298 | Amali | Bila | 651.999.000 | - | - | 221.762.000 | 873.761.000 |
| 299 | Tellulimpoe | Tellang Kere | 651.999.000 | - | - | 405.042.000 | 1.057.041.000 |
| 300 | Tellulimpoe | Lagori | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 363.942.000 | 1.160.037.000 |
| 301 | Tellulimpoe | Gaya Baru | 651.999.000 | - | - | 542.667.000 | 1.194.666.000 |
| 302 | Tellulimpoe | Tapong | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 593.499.000 | 1.427.132.000 |
| 303 | Tellulimpoe | Sadar | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 579.181.000 | 1.412.814.000 |
| 304 | Tellulimpoe | Tondong | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 342.303.000 | 1.175.936.000 |
| 305 | Tellulimpoe | Samaenre | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 413.623.000 | 1.247.256.000 |
| 306 | Tellulimpoe | Bonto Masunggu | 651.999.000 | - | - | 424.734.000 | 1.076.733.000 |
| 307 | Tellulimpoe | Pallawa | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 459.083.000 | 1.255.178.000 |
| 308 | Tellulimpoe | Polewali | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 591.532.000 | 1.425.165.000 |
| 309 | Tellulimpoe | Batu Putih | 651.999.000 | 181.634.000 | - | 375.336.000 | 1.208.969.000 |
| 310 | Bengo | Samaenre | 651.999.000 | - | - | 395.324.000 | 1.047.323.000 |
| 311 | Bengo | Tungke | 651.999.000 | - | - | 565.744.000 | 1.217.743.000 |
| 312 | Bengo | Seli | 651.999.000 | - | - | 622.354.000 | 1.274.353.000 |
| 313 | Bengo | Bengo | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 317.701.000 | 1.113.796.000 |
| 314 | Bengo | Mattaropuli | 651.999.000 | - | - | 370.636.000 | 1.022.635.000 |
| 315 | Bengo | Lili Riawang | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 638.755.000 | 1.434.850.000 |
| 316 | Bengo | Walimpong | 651.999.000 | - | - | 480.614.000 | 1.132.613.000 |
| 317 | Bengo | Bulu Allaporeng | 651.999.000 | - | 144.096.000 | 335.742.000 | 1.131.837.000 |
| 318 | Bengo | Mattirawalie | 651.999.000 | - | - | 310.840.000 | 962.839.000 |
| 319 | Patimpeng | Patimpeng | 651.999.000 | - | - | 246.331.000 | 898.330.000 |
| 320 | Patimpeng | Latellang | 651.999.000 | - | - | 230.956.000 | 882.955.000 |
| 321 | Patimpeng | Maddanreng pulu | 651.999.000 | - | - | 223.043.000 | 875.042.000 |
| 322 | Patimpeng | Masago | 651.999.000 | - | - | 151.488.000 | 803.487.000 |
| 323 | Patimpeng | Batu Lappa | 651.999.000 | - | - | 218.648.000 | 870.647.000 |
| 324 | Patimpeng | Paccing | 651.999.000 | - | - | 245.916.000 | 897.915.000 |
| 325 | Patimpeng | Massia | 651.999.000 | - | - | 336.374.000 | 988.373.000 |
| 326 | Patimpeng | Talabangi | 651.999.000 | - | - | 282.377.000 | 934.376.000 |
| 327 | Patimpeng | Pationgi | 651.999.000 | - | - | 581.850.000 | 1.233.849.000 |
| 328 | Patimpeng | Bulu Ulaweng | 651.999.000 | - | - | 230.731.000 | 882.730.000 |
| Total | | | 213.855.672.000 | 10.534.772.000 | 4.755.168.000 | 104.642.244.000 | 333.787.856.000 |



BUPATI BONE, &

A. Fahsar M. Padjalangi
A. FAHSAR M. PADJALANGI

A. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN BLT DESA

LAPORAN PELAKSANAAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

DESA.....KECAMATAN.....

KABUPATEN.....

| NO | NIK | NAMA KEPALA KELUARGA/ YANG MEWAKILI | JUMLAH PENERIMAAN | TANGGAL PENERIMAAN | TANDATANGAN/ CAPJEMPOL |
|----|-----|--|-------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |

TELAH DIVERIFIKASI OLEH
SEKRETARIS DESA

(.....)

YANG MEMBAYAR
KAUR/KASI (PKA)

(.....)

MENGETAHUI
KEPALA DESA.....

(.....)

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN KELUARAN DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA DESA
 TAHAP....TAHUN 202X
 PEMERINTAH DESA.....
 KECAMATAN.....KABUPATEN BONE

| NO | URAIAN | URAIAN OUTPUT | VOLUME OUTPUT | CARA PENGADAAN | ANGGARAN (RP) | REALISASI (RP) | SISA (RP) | %CAPAIAN OUTPUT | TENAGA KERJA | DURASI | UPAH | KET |
|------------|---|---------------|---------------|----------------|---------------|----------------|-----------|-----------------|--------------|--------|------|-----|
| | | | | | | | | | ORANG | HARI | (RP) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Pendapatan | | | | | | | | | | | |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1.1 | Dana Desa | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | | | | | | | | | | |
| 2 | Belanja Desa | | | | | | | | | | | |
| 2.02 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | | | | | | | | | | |
| 2.02.01.01 | Kegiatan... | | | | | | | | | | | |
| 2.03 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | | | | | | | | | |
| 2.03.01.01 | Kegiatan... | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH BELANJA DESA | | | | | | | | | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN-BELANJA-PEMBIAYAAN | | | | | | | | | | | |

.....,20XX

KEPALA DESA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C. FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TK. DESA

**LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA
TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK**

Kabupaten : Bone
Desa :

Kecamatan :
Tahun :

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)

| Sasaran | JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK | IBUHAMIL | | ANAK 0- 23 BULAN | |
|---------|----------------------------------|----------|-----------|------------------|----------------------------------|
| | | TOTAL | KEK/RESTI | TOTAL | GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING |
| Jumlah | | | | | |

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI STUNTING)

| Sasaran | JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN | HIJAU (NORMAL) | Kuning (Resiko Stunting) | Merah Terindikasi Stunting |
|---------|-------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| Jumlah | | | | |

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN STUNTING BAGI 1.000 HPK

| Sasaran | Indikator | Jumlah | % |
|-----------------------------------|--|--------|---|
| Ibu Hamil | 1 Ibu hamil periksa kehamilan paling sedikit 4 kali selama kehamilan. | | |
| | 2 Ibu hamil mendapatkan dan minum 1 tablet tambah darah (pil FT) setiap hari minimal selama 90 hari | | |
| | 3 Ibu bersalin mendapatkan layanan nifas oleh nakes dilaksanakan minimal 3 kali | | |
| | 4 Ibu hamil mengikuti kegiatan konseling gizi atau kelas ibu hamil minimal 4 kali selama kehamilan | | |
| | 5 Ibu hamil dengan kondisi resiko tinggi dan/atau Kekurangan Energi Kronis (KEK) mendapat kunjungan ke rumah oleh bidan Desa secara terpadu minimal 1 bulan sekali | | |
| | 6 Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana akses air minum yang aman | | |
| | 7 Rumah Tangga Ibu hamil memiliki sarana jamban keluarga yang layak. | | |
| | 8 Ibu hamil memiliki jaminan layanan kesehatan | | |
| Anak 0 sd 23 Bulan (0 sd 2 Tahun) | 1 Bayi usia 12 bulan ke bawah mendapatkan imunisasi dasar lengkap | | |
| | 2 Anak usia 0-23 bulan diukur berat badannya di posyandu secara rutin setiap bulan | | |
| | 3 Anak usia 0-23 bulan diukur panjang/tinggi badannya oleh tenaga kesehatan terlatih minimal 2 kali dalam setahun | | |
| | 4 Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti kegiatan konseling gizi secara rutin minimal sebulan sekali. | | |
| | 5 Anak usia 0-23 bulan dengan status gizi buruk, gizi kurang, dan stunting mendapat kunjungan ke rumah secara terpadu minimal 1 bulan sekali | | |
| | 6 Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana akses air minum yang aman | | |
| | 7 Rumah Tangga anak usia 0-23 bulan memiliki sarana jamban yang layak | | |
| | 8 Anak usia 0-23 bulan memiliki akte kelahiran | | |
| | 9 Anak usia 0-23 bulan memiliki jaminan layanan kesehatan | | |
| | 10 Orang tua/pengasuh yang memiliki anak usia 0-23 bulan mengikuti Kelas Pengasuhan minimal sebulan sekali | | |
| Anak 2 sd 6 Tahun | 1 Anak usia 2-6 tahun terdaftar dan aktif mengikuti kegiatan layanan PAUD | | |

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA

| No | SASARAN | JUMLAH INDIKATOR | | TINGKAT KONVERGENSI (%) |
|--------------------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------|
| | | YANG DITERIMA | SEHARUSNYA DITERIMA | |
| 1 | Ibu Hamil | | | |
| 2 | Anak 0 - 23 Bulan | | | |
| TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA | | | | |

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN STUNTING

| No | BIDANG/KEGIATAN | TOTAL ALOKASI DANA | KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING | |
|----|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------|
| | | | ALOKASI DANA | %(PERSEN) |
| 1 | Bidang Pembangunan Desa | | | |
| 2 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | | | |

D. FORMAT LEMBAR KONFIRMASI PENERIMAAN

KOP DESA

Telah Terima Dari : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk Keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020 Kab/Kota.....

Dengan Rincian :

| TAHAP | TANGGAL TERIMA | JUMLAH | TERBILANG (Dengan Huruf) |
|-------|----------------|--------|--------------------------|
| | | | |

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :

Nama Rekening :

Nama Bank :

.....,.....20xx

Kepala Desa.....

materai 6000

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX